



PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL BERINKLUSI SOSIAL DALAM EKOSISTEM DIGITAL BERBASIS MULTIKULTURAL INDONESIA

Hartono

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Indonesia

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Perpustakaan Digital, Inklusi Sosial,
Ekosistem Digital, Multikultural

***Correspondence Address:**

hartono_hary@yahoo.co.id

Abstract: In the history of civilization, libraries are organizations that grow and develop organisms that are able to adapt to the times. A number of factors related to library development in the digital ecosystem are the issue of the industrial revolution of era 4.0 marked by the Internet of think, artificial intelligence, big data and the community of era 5.0 based on the era of humanity-based society. The transformation of libraries in the new era has shifted the role of digital libraries in developing digital libraries in socially inclusive digital ecosystems. In a digital ecosystem, a digital library has various advantages that will support the tasks of digital library professionals including the ability to provide information, organize, store, manage information and disseminate information while preserving information. However the demands of era should not affect to the management of the digital library itself. Then in universally, all types of digital libraries carry functions as an educational center, repository center, research center, information center, and cultural center. Then each type of digital library has social inclusion to perform the five functions. The role of digital libraries in developing social inclusion with a multicultural perspective in Indonesia, can play the following roles: (a) understanding cultural diversity in digital libraries; (b) appreciates the collection of digital libraries to meet the diverse information needs of users; (c) develop human resources professionally; (d) interact with information technology fluently; and (e) building critical awareness of the regulation of digital library access policies.

PENDAHULUAN

Dalam era informasi yang ditandai oleh modernisasi di bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan yang dahsyat pada segala aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia telah menimbulkan revolusi informasi pada segala aktivitas dunia serta dalam bidang bisnis karena akibat meluapnya informasi (*information exsplotions*). Dalam isu yang sama bahwa dalam era revolusi industri 4.0 sebagai era baru antara lain ditandai industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Merupakan trend otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem *cyber-fisik*, *Internet of Things (IoT)*,

komputasi awan dan komputasi kognitif yang berimbas pada tata kelola lembaga dan pusat-pusat informasi seperti perpustakaan digital. Era baru tersebut telah menggeser peran dan fungsi serta tata kelola perpustakaan digital tradisional menuju perpustakaan digital modern berbasis digital. Modernisasi teknologi informasi dan inovasi, deskripsi tersebut sebenarnya juga memiliki arti penting bagi lembaga yang bergerak dalam bidang informasi termasuk perpustakaan digital.

Peran perpustakaan digital dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi, lebih dari itu perpustakaan digital dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keragaman budaya. Peran perpustakaan dalam pengembangan inklusi sosial, sebagaimana Tariq (2018) didasarkan bahwa (a) perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan kebudayaan, (b) perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, (c) perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat. Dan (d) perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.¹

Modernisasi perpustakaan digital juga telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pasal 2 dijelaskan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.² Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan kata kunci dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dinamika perpustakaan digital dari berbagai inovasinya telah merambah pada segala aspek kehidupan masyarakat, bukan saja untuk kebutuhan mencari informasi di lingkungan perpustakaan saja namun sudah merambah kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan digital Indonesia, menjadikannya penting yang tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, budaya yang dikenal dengan multikultural Indonesia. Bertolak dari pemikiran di atas

¹ Ashraf, Tariq. (2018) *Transforming Libraries into Centers of Community Engagement: Towards Inclusion, Equality & Empowerment*. University of Delhi South Campus.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang *Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007, pasal 2.

bahwa transformasi perpustakaan digital berbasis inklusi sosial merupakan wujud perpustakaan digital sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dimana perpustakaan digital bukan hanya sebagai pusat sumber informasi, tetapi lebih dari itu; sebagai tempat mentransformasikan diri, sebagai pusat sosial budaya berbasis layanan perpustakaan digital dengan memberdayakan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Perpustakaan Digital dalam Ekosistem Digital

Perpustakaan merupakan produk budaya sekaligus representasi dari berbagai budaya nusantara yang melakukan tugas dan perannya dalam menyediakan informasi, mengelola informasi, serta mendesiminasikan informasi kepada pemustaka yang beragam. Pengembangan koleksi dan informasi baik tercetak, tertulis, terekam dan digital maupun tulisan-tulisan pada dasarnya merupakan ekspresi kebudayaan. Pembangunan perpustakaan digital merupakan integrasi terhadap keragaman budaya baik dalam konteks koleksi yang dihimpun, diorganisasikan, serta keberagaman masyarakat.

Secara definitif, Borgman dalam Teed menyebutkan bahwa :

*“Digital libraries are set of electronic resources and associated technical capabilities for creating, searching and using information. In this sense they are an extension and enhancement of information storage and retrieval systems that manipulate digital data in any medium (text, images, sounds ...) and exist in distributed networks.”*³

Dalam pendapat di atas disebutkan bahwa perpustakaan digital merupakan kumpulan koleksi sumber elektronik (*e-resources*) yang memungkinkan aktivitas untuk penciptaan, penelusuran, dan akses sumber elektronik. Dalam upaya pengembangannya bahwa dalam penyimpanan, penelusuran informasi, serta memanipulasi data dalam media teks, gambar, suara atau gambar dapat didistribusikan melalui jaringan (*network*). Dari keseluruhan definisi penulis menyimpulkan bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang memiliki sebagian besar atau sebagian koleksinya dalam bentuk digital yang dapat diakses secara *online* melalui jaringan komputer.

³ Tedd, Lucy A. dan Andrew Large. *Digital Library: Principles and Practice in a Global Environment*. Munchen: K.G. Saur, 2005.

Dalam pengembangan perpustakaan digital baik secara teknis maupun non teknis sebagaimana disampaikan dalam Pendit⁴ dalam pengembangan perpustakaan digital terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, aspek organisasional. Dalam pengembangan perpustakaan digital, aspek organisasi merupakan infrastruktur penting dan strategis untuk mendapatkan perhatian. Aspek ini mencakup permasalahan; tata kehidupan perguruan tinggi sebagai masyarakat pengguna jasa perpustakaan digital, persoalan pengaturan sumber daya informasi dan pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks manajemen perpustakaan digital secara keseluruhan. Pada aspek ini dibahas mengenai kesinambungan dan perubahan yang diperlukan oleh sebuah perpustakaan digital jika hendak memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, dalam aspek ini juga disinggung tentang organisasi informasi itu sendiri, yang mengalami perubahan mendasar sejak digunakannya komputer sebagai alat bantu penyimpanan dan penemuan kembali informasi. Kemudian dalam konteks implementasinya, pengembangan perpustakaan digital pada aspek organisasi mencakup organisasi sebuah lembaga informasi, sumber daya informasi, sumber daya manusia, manajemen, dan anggaran pengembangan perpustakaan digital.

Kedua, aspek mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi. Dalam pengembangan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi, pengelolaan perpustakaan digital pada aspek mekanisasi, otomatisasi dan komunikasi informasi merupakan komponen kunci dan sangat menentukan sukses atau tidaknya dalam tahap implementasi atau pelaksanaan perpustakaan digital. Aspek ini meliputi infrastruktur teknologi informasi, metadata, sistem temu kembali informasi, jaringan telekomunikasi, internet dan *web*, dan teknik digitalisasi. Pada aspek ini ciri-ciri dasar masing-masing teknologi dan bagaimana memanfaatkan ciri-ciri tersebut bagi pengelolaan organisasi perpustakaan digital yang baru.

Ketiga, aspek legalitas. Dalam pengembangan perpustakaan digital, aspek hukum dan etika dalam informasi menjadi sangat penting pada era informasi. Aspek legalitas menyangkut etika dalam digitalisasi, transaksi elektronik, hak cipta (*intellectual property*) dan plagiarisme. Sampai saat ini masih banyak perdebatan yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya mengatur penggunaan teknologi digital agar tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan tentang hak serta

⁴ Pendit, Putu Lakman. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.

kewajiban orang. Sebagai sebuah masyarakat modern, perpustakaan digital memerlukan pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam cara menyajikan, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan informasi dalam kegiatan pendidikan tinggi. Perpustakaan digital juga masih bekerja dengan prinsip-prinsip legal dan etika yang didasarkan pada tradisi cetak. Manakala teknologi digital membawa ciri-ciri baru ke dunia kepustakawanan, maka adalah tugas pustakawan untuk memahami aturan-aturan baru yang diperlukan agar kegiatan perpustakaan digital tetap pada koridor hukum yang berlaku di sebuah masyarakat.

Dalam ekosistem digital sebuah perpustakaan digital memiliki berbagai keunggulan akan mendukung tugas-tugas profesional perpustakaan digital antara lain memiliki kemampuan dalam menyediakan informasi, mengorganisasi, menyimpan, mengelola informasi dan mendiseminasi informasi sekaligus melestarikan informasi. Namun demikian kemajuan dan tuntutan zaman tersebut jangan sampai berimbas dalam manajemen perpustakaan digital itu sendiri. Dalam konteks ini, bahwa perpustakaan digital berusaha untuk berbagi informasi kepada para pemustaka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan digital perlu disesuaikan dengan kondisi pemustaka yang dilayani. Idealnya, sebelum mendesain dan mengaplikasikan sesuatu yang baru, termasuk perpustakaan digital, terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap kebutuhan pemustaka. Hal ini dilakukan terutama untuk mengetahui informasi apa yang mereka butuhkan ketika berkunjung ke perpustakaan digital. Selain itu, hasil analisis nantinya akan memengaruhi desain model perpustakaan digital yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sebaiknya perpustakaan digital menyediakan ruang yang akan memberikan kesempatan bagi pemustaka untuk saling berbagi informasi, termasuk bagaimana pengembangan perpustakaan digital ke depan.

Peran Perpustakaan Digital dalam Inklusi Sosial

Pengembangan perpustakaan digital perlu dibina dengan organisasi dan manajemen yang baik dan konseptual. Ilmu manajemen sebagian besar digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Namun demikian bukan berarti bahwa manajemen tidak dapat ditarik kedalam disiplin ilmu lain. Agar penerapan perpustakaan digital dapat berjalan dengan baik, maka saat inilah manajemen berperan. Manajemen perpustakaan digital

dapat terlaksana sebagaimana mestinya jika diimbangi dengan pemahaman konsep perpustakaan digital yang sesuai.

Berkaitan dengan inklusi sosial bahwa secara definitif inklusi sosial merupakan pelayanan dengan yang berkomitmen terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Makna dalam pendekatan inklusi sosial meliputi sebagai berikut : pertama, pendekatan layanan ini berbasis kemanusiaan, kualitas hidup dan kesejahteraan. Kedua, inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sosial atau pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*). Ketiga, pendekatan inklusif memandang perpustakaan merupakan sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan dan keempat, perpustakaan dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatn sosial yang tinggi di masyarakat dan kelima, perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Menurut Suharyanto (2017) bahwa dokumen ini juga memaparkan tentang pengertian perpustakaan digital berbasis inklusi sosial, yaitu perpustakaan digital proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan digital juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan digital. Terhadap latar belakang ini, penting bahwa layanan yang ditawarkan perpustakaan digital harus siap dapat diakses oleh semua yang membutuhkan. Sehingga Layanan perpustakaan digital dapat merangkul kalangan seluas mungkin.⁵

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Transformasi tersebut dapat diwujudkan dalam 4 (empat) peran, yaitu: (1) Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan (2) Perpustakaan digital dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat (3) Perpustakaan digital menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat (4) Perpustakaan digital memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi. Pembangunan perpustakaan digital bagi masyarakat tidak akan lepas dari keinginan untuk saling berbagi.

⁵ Suharyanto. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Jakarta : Perpustakaan Nasional

Berdasarkan urgensinya bahwa perpustakaan digital bertugas dalam menghimpun, mengelola, mengolah/mengorganisasi informasi, melestarikan informasi dan melayankan informasi kepada masyarakat pengguna. Kemudian secara umum (universal), semua jenis perpustakaan digital mengemban fungsi sebagai berikut: fungsi edukasi, fungsi repositori, fungsi riset, fungsi Informasi, fungsi rekreasi dan fungsi kultural. Kemudian setiap jenis perpustakaan digital melakukan kelima fungsi tersebut. Namun, masing-masing jenis perpustakaan digital memiliki penekanan dan keutamaan yang sedikit berbeda.

Implementasi layanan perpustakaan digital berbasis inklusi sosial terbangun dalam 3 (tiga) aspek antara lain pertama, meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengetahuan dan informasi yang disediakan perpustakaan. *kedua*, perpustakaan menjadi pusat pengembangan diri setiap orang, menjadi pusat komunitas, ruang bekerja (*working space*) dan ruang mengembangkan diri untuk meningkatkan martabat setiap individu, *ketiga*, masyarakat di sekitar perpustakaan merasakan manfaat layanan perpustakaan untuk meningkatkan martabat mereka secara individu, dan *ketiga* setiap pengguna perpustakaan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri yang disediakan di perpustakaan.

Contoh inklusi sosial sebagai berikut : Contoh Inklusi Sosial pertama Bismark Medina Rivalda (Malang) pada awalnya bekerja serabutan karena menggunakan perpustakaan digital akhirnya bisa beternak burung puyuh dan mampu menghidupi sendiri. (BMR-2019), Kedua, bahwa Harry B. Kusuma (Blitar) dalam keseharian bekerja pada Sistem Informasi pada Radio Patria karena berkunjung ke Perpustakaan Bung Karno Blitar akhirnya mampu membuat video klip ada mampu menghasilkan uang untuk menabung sendiri (HBK-2018), dan Sandrina Hanifah, belum bisa mengaji berkat menggunakan fasilitas perpustakaan digital Islam akhirnya sangat lancar dalam membaca Al Quran dan Hadist. (STH-2017) Keberhasilan ketiga contoh dalam menggunakan perpustakaan digital tersebut sebagai bukti keberhasilan peran perpustakaan digital dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam implementasinya pada perpustakaan digital, pelaksanaan sentral tersebut sebagai berikut: *pertama*, pusat pendidikan (*center of learning*) Perpustakaan digital didirikan dengan fungsi utama sebagai salah satu sarana yang menunjang pencapaian

⁶ Observasi bagi pemustaka dalam berinklusi sosial dalam ekosistem digital Malang, 18 September 2019

tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan. Keberadaannya harus sejalan dengan prinsip sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat serta diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Perpustakaan digital harus menyediakan dan mengelola berbagai bahan perpustakaan digital *e-book*, *e-journal*, *e-video*, *e-audio* dan aplikasi lainnya yang sesuai berfungsi sebagai tempat dan sumber belajar bagi siswa serta sumber rujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pusat repositori (*center of repository*) bahwa fungsi penyimpanan dan pelestarian pada perpustakaan digital bukanlah fungsi utamanya. Akan tetapi, perpustakaan digital tetap harus menyimpan dan melestarikan koleksi bahan perpustakaan digital tercetak ataupun terekam sebagai hasil karya putra bangsa yang masih relevan dan diperlukan oleh masyarakat pemustakanya, yaitu siswa, pendidik, dan staf administrasi sekolah dalam menyokong pencapaian sasaran pendidikan dan pembelajaran para siswanya secara optimal, yang dilakukan dengan pengembangan simpanan kelembagaan (*institutional repository*).

Ketiga, pusat riset (*center of reasearch*), bahwa perpustakaan digital juga berfungsi sebagai tempat mendapatkan informasi yang mendukung penelitian demi kesejahteraan masyarakat. Bentuk jasa perpustakaan digital yang dapat diberikan adalah penyediaan berbagai literatur sebagai bahan rujukan dalam bentuk *e-reference* yang menjadi koleksi perpustakaan digital, baik literatur primer, sekunder, tersier, maupun berbagai alat peraga pendidikan lainnya.

Keempat, pusat informasi informasi (*center of information*), perpustakaan digital menyediakan informasi bagi pemustakanya, baik informasi tentang berbagai bahan pustaka yang dimilikinya (cakupan, jenis, penempatan, dan lain-lain), informasi tentang berbagai aktivitas dan layanan perpustakaan digital yang ditawarkan, maupun informasi tentang lingkungan sekitar perpustakaan digital tersebut. Peran perpustakaan perlu membangun *database* perpustakaan digital dan *webside* guna mendapatkan akses kesejahteraan masyarakat.

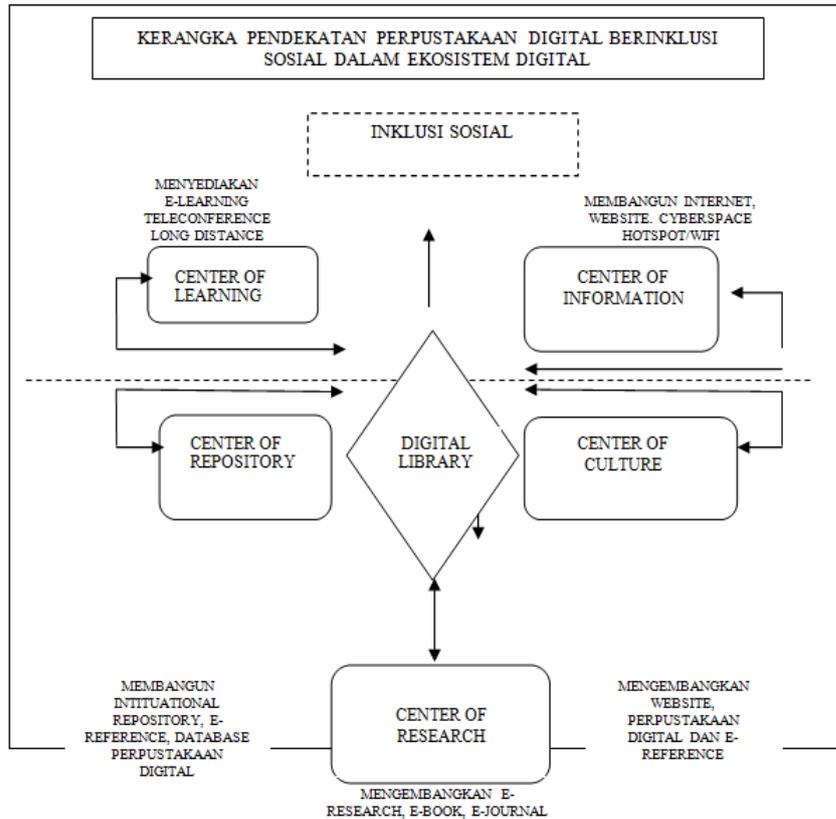
Kelima, pusat kultural (*center of culture*), bahwa perpustakaan digital juga berfungsi sebagai unit menyimpan khazanah budaya bangsa, yaitu melalui penyimpanan dan pelestarian berbagai bahan pustaka yang memuat khazanah budaya bangsa. Fungsi sebagai pusat sarana budaya ini dapat dilakukan oleh perpustakaan digital dengan

mengadakan berbagai kegiatan, seperti pameran buku, foto, peragaan busana daerah, pentas kesenian, *story telling*, dan sebagainya. Selain sebagai pusat kultural, perpustakaan digital pun memiliki fungsi rekreasi budaya dalam format digital yang bersifat informasi digital yang ringan, seperti penyediaan koleksi digital dalam bentuk hiburan, berbagai hikayat, dalam bentuk *e-video*, *e-audio* lagu-lagu daerah yang menambah kesegaran rohani, dan sebagainya.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa perpustakaan digital memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peran perpustakaan digital dalam mengembangkan pembelajaran tersebut dapat dijelaskan bahwa pemustaka memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi koleksi-koleksi informasi secara mandiri dan dapat berkomunikasi secara interaktif dengan pengajar, serta dapat mempublikasikan karyanya secara langsung dan pemustaka diberi kemudahan dengan adanya peralatan elektronik dalam hal pencarian informasi dari sumber-sumber yang dibutuhkannya.

Mengingat internet sangat berperan dalam implementasi perpustakaan digital di perguruan tinggi. Internet sebagai media dimana koleksi digital tersedia, standar dan teknologinya juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Kemudian untuk mengembangkan pembelajaran elektronik (*e-learning*) maka perpustakaan digital diharapkan mampu mengembangkan inklusi sosial dalam ekosistem digital. Dalam pendidikan elektronik, kontribusi perpustakaan digital adalah dalam bentuk menyediakan, mengorganisasi, menyimpan, melestarikan dan mendiseminasikan informasi dalam upaya mengembangkan pendidikan elektronik (*e-learning*).

“Peran perpustakaan digital berinklusi sosial dalam ekosistem digital ” dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Urgensi Perpustakaan Digital Berinklusi Sosial

Pengembangan Perpustakaan digital Berinklusi Sosial Berwawasan Multikultural Indonesia

Perpustakaan digital merupakan produk budaya sekaligus representasi dari berbagai budaya nusantara yang melakukan tugas dan perannya dalam menyediakan informasi, mengelola informasi, serta mendesiminasikan informasi kepada pemustaka yang beragam. Pengembangan koleksi dan informasi baik tercetak, tertulis, terekam dan digital maupun tulisan-tulisan pada dasarnya merupakan ekspresi kebudayaan. Secara definitif bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan digital yang sebagian atau sebagian besar koleksinya dalam bentuk digital yang dapat diakses secara online melalui jaringan komputer.

Sedangkan multikulturalisme secara definitif sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dari sebuah masyarakat yang ditandai dengan menggunakan lebih dari satu kebiasaan atau keragaman budaya atau multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan

kemanusiaannya. Menurut Baidhawiy (2005),⁷ “multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Kemudian menurut Banks (1993)⁸ nilai multikultural merupakan nilai-nilai yang dibangun atas kesadaran bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia. Selain itu, juga mengadopsi teori menurut Gollnick dan Chinn (1998)⁹ yang menjelaskan bahwa nilai-nilai multikultural adalah pemahaman, pengakuan, dan penerapan pentingnya nilai demokrasi, humanisme, keadilan, kebersamaan dan toleransi kepada orang lain dalam bersikap dan berhubungan dengan orang lain yang mempunyai latar belakang kultural Indonesia yang berbeda (seperti agama, ras, etnis, bahasa, asal suku bangsa, perbedaan kemampuan, umur, kelas sosial, dan lain-lain).

Dalam konteks manajemen, perpustakaan digital melaksanakan tugas dalam menghimpun, mengelola, melestarikan, dan melayani koleksi kepada masyarakat dengan berbasis pada koleksi digital yang dapat diakses secara *online* melalui jaringan. Berkaitan dengan konsep perpustakaan digital tersebut, maka dapat dipahami perpustakaan digital berkaitan dengan bagaimana mendigitalisasikan obyek/bahan dan menyediakannya secara *online*, bagaimana memasukkan informasi baru yang belum memiliki bentuk penyajian secara nyata seperti layaknya koleksi perpustakaan digital, dan bagaimana menemukan bahan-bahan dalam perpustakaan digital.

Strategi pengembangan perpustakaan digital dengan berbasis keragaman budaya sebagaimana disampaikan Ahmed bahwa untuk menggali sistem nilai yang berakar pada nilai multikultural yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan perpustakaan digital. Keunikan dalam aspek organisasi dan manajemen, aspek implementasi teknologi informasi, dan aspek legalitas pemanfaatan informasi masih terkategori jarang dilakukan namun pengembangannya berbeda-beda. Di sisi lain, sebagaimana Laksmi menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan perpustakaan digital, ada nilai-nilai budaya yang belum tergalikan dari interaksi manusia, antara lain nilai budaya untuk memahami

⁷ Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta : Erlangga, 2005.

⁸ Banks, James A., “Multikultural Education: Characteristics and Goals”, dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (Ed.), *Multikultural Education: Issues and Perspective*, Amerika: Allyn and Bacon, 1993.

⁹ Gollnick, Donna M and Philip C. Chin. *Multicultural Education in Pluralistic Society*. New Jersey : Prentice Hall, 1998.

keragaman budaya bagi pengguna dan pustakawan dalam memahami kebutuhan pemustaka, nilai berkomunikasi secara positif dan efektif, nilai berinteraksi, nilai bekerjasama, berkreasi, dan berinovasi.

Keberhasilan organisasi dan kinerja lembaga informasi (manajemen perpustakaan digital) bukan saja ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh faktor budaya. Kesuksesan lembaga informasi tersebut didasarkan pada nilai Islam keragaman budaya (*multikultural*) berupa konsep sikap, norma, nilai, dan perilaku terhadap kinerja lembaga perpustakaan digital. Nilai tersebut adalah demokrasi, humanisme, keadilan, kebersamaan, dan nilai menghargai perbedaan (toleransi). Nilai Islam multikultural merupakan nilai yang bersumber pada ajaran Tuhan yang sudah diyakini kebenarannya yang mampu mendasari sebuah modernitas kebudayaan dari zaman ke zaman.

Kehadiran perpustakaan digital tersebut diharapkan mengatasi kesenjangan-kesejahteraan dalam akses informasi masyarakat. Kendala utama dalam pengembangan perpustakaan digital pada perguruan tinggi pada umumnya adalah belum optimalnya aksesibilitas informasi. Permasalahan aksesibilitas informasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masalah manajemen, teknologi, kebijakan dan regulasi akses hingga dengan masalah sosial budaya. Dalam pengelolaan perpustakaan digital, di samping masalah teknis dan manajerial, nilai-nilai keberagaman masyarakat merupakan pilar penting dalam pengembangan demokrasi informasi, inovasi teknologi, dan keadilan dalam legalitas informasi yang dapat melayani aksesibilitas masyarakat secara demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya memperjelas "Pola Strategi-Strategi Perpustakaan Digital Berinklusi Sosial dalam Ekosistem Digital" dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) demokrasi informasi berinklusi sosial, (b) humanisme teknologi digital, (c) kebersamaan dalam kerjasama perpustakaan digital, (d) keadilan akses dan (e) toleransi dalam mengembangkan jasa kemitraan ekosistem digital.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi perpustakaan digital diperlukan strategi pengembangan perpustakaan digital berbasis nilai-nilai Islam *multicultural*, yakni dalam rangka atau tujuan sebagai berikut: (a) memahami keanekaragaman budaya dalam merancang dan mendesain perpustakaan digital; (b) menghargai koleksi perpustakaan digital untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang beraneka ragam; (c) mengembangkan sumber daya manusia secara

profesional; (d) berinteraksi dengan teknologi informasi dengan lancar; dan (e) membangun kesadaran kritis terhadap regulasi kebijakan akses perpustakaan digital.

KESIMPULAN

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wujud perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Di mana perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi untuk baca dan tulis tetapi lebih dari itu sebagai tempat mentransformasikan diri sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat ditentukan oleh pengelola perpustakaan dalam mengembangkan kreativitasnya.

Peran perpustakaan digital dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi lebih dari itu perpustakaan digital dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian peran perpustakaan dalam pengembangan inklusi sosial didasarkan bahwa pertama, perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan kebudayaan, kedua, perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, ketiga, perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat. Dan keempat, perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dalam ekosistem digital sebuah perpustakaan digital memiliki berbagai keunggulan akan mendukung tugas-tugas profesional perpustakaan digital antara lain memiliki kemampuan dalam menyediakan informasi, mengorganisasi, menyimpan, mengelola informasi dan mendiseminasi informasi sekaligus melestarikan informasi. Namun demikian kemajuan dan tuntutan zaman tersebut jangan sampai berimbas dalam manajemen perpustakaan digital itu sendiri. Kemudian secara umum (universal), semua jenis perpustakaan digital mengemban fungsi sebagai pusat edukasi (*center of learning*), pusat repositori, (*center of repository*), pusat riset (*center of research*), pusat informasi (*center of information*), dan pusat kultural (*center of cultural*). Kemudian setiap jenis perpustakaan digital berinklusi sosial untuk melakukan melakukan kelima fungsi tersebut.

Peran perpustakaan digital dalam mengembangkan inklusi sosial berwawasan multikultural Indonesia antara lain dapat berperan sebagai berikut: (a) memahami keanekaragaman budaya dalam perpustakaan digital; (b) menghargai koleksi perpustakaan digital untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang beraneka ragam; (c) mengembangkan sumber daya manusia secara profesional; (d) berinteraksi dengan teknologi informasi dengan lancar; dan (e) membangun kesadaran kritis terhadap regulasi kebijakan akses perpustakaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amich Alhumami. 2018. Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian SDGs. Kementerian PPN/Bappenas. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan.
- Ashraf, Tariq. 2018. *Transforming Libraries into Centers of Community Engagement: Towards Inclusion, Equality & Empowerment*. University of Delhi South Campus.
- Banks, James A. 1997. "Multikultural Education: Characteristics and Goals", dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (Ed.), *Multikultural Education: Issues and Perspective*, Amerika: Allyn and Bacon.
- Bounfour, Ahmed. 2016. *Digital Futures, Digital Transformation : From Lean Production to Acceluction*. London: Springer.
- Branka, Maja. 2015. *Multicultural Library*. Warsawa: Information Society Development Foundation.
- Dalbelooo, Marija. 2009. Cultural dimension of digital library development. Part II : The Cultures of Innovation in Five European National. *Library Quarterly*. Vol. 9. No. 1 pp. 1 – 72.
2003. *Expectations of Librarians in the 21st Century/* edited by Karl Briges. London: Greenwood Press.
- Deegan, Marilyn and Simon Tanner. 2002. *Digital Futures : Strategis for the Information age* (London : Library Association Publishing), hlm. 23.

- Donna M. Gollnick, and Philip C. Chinn. 2015. *Multicultural Education in A Pluralistic Society*, (Prentice Hall; New Jersey, 1998), hlm 24-25. 111Thaqafiyat Vol. 16, No. 1, Juni.
- Fourie, Ina. 2007. Public libraries addressing social inclusion: how we may think... world library and information congress: 73rd ifla general conference and council 19-23 august 2007, durban, south africa
- Johnson, Kay and Magusin, Elaine. 2015. *Exploring the Digital Library: a Guide for Online Teaching and Learning*. San Francisci: John Wiley & Sons.
- Hartono. 2019. Strategi Pengembangan Perpustakaan Digital dalam membangun Aksesibilitas Informasi Berbasis Nilai Islam Multikultural : Studi Kasus pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Malang Jawa Timur.” *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- _____. 2017. *Pengetahuan Dasar Perpustakaan Digital : Konsep, Dinamika dan Transformasi*. Jakarta : Sagung Seto.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta : Balai Pustaka.
- Laksmi. 2006. *Tinjauan Multikultural terhadap Kepustakawanan : Inspirasi dari Sebuah Karya Umberto Eco*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Perspektif budaya.
- Liza Rositasari. 2009. *Kerjasama : Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Islam* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Diterbitkan oleh Yogyakarta Idea Press.
- Materi Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan. 2019. Jakarta: Pusat Pengembangan Pustakawan.
- Menemy, David Mc. 2007. Ranganathan’s Relevance in the 21st Century. *Library Review* 56 (2) (2007) : 97 – 1011
- Multicultural Communities : Guidelines for Library Services*. 3rd Edition. 2009. IFLA Multicultural Library Manifesto.
- Kaars-Brown, Michelle ...[et.al]. 2004. Organizational Cultures of Libraries as a Strategic Resources/ *Library Trends*, Vol. 53 No. 1 Summer. The Board of Trustees, University of Illinois.
- Ostrov, Rona. 1998. Library Culture in Electronic Age : A Case Study of Organizational Change. *Proquest Dissertations & Thesis Global* : The Humanities and Social Sciences Collection.

- Pendit, Putu Laxman. 2003. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi suatu Pengantar Diskusi Epistemology dan Metodologi*. Jakarta : JIP – FS UI.
- _____. 2009. *Perpustakaan Digital: Kesenambungan dan Dinamika*. Jakarta: Cita Karya Karsa.
- _____. 2008. *Perpustakaan Digital dari A sampai Z*. Jakarta : Cita Karyakarsa Mandiri.
- _____. 2009. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri. 2000. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam : Essential Writings of Abdolkarim Soroush/* translade, edited and with a Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
- Rubin, Richard E. 2016. *Foundations of Library and Information Science*. 4th. United States : American Library Association.
- Saleh, Abdul Rahman. 2014. *Pengembangan Perpustakaan Digital* . Tangerang Selatan : Universitas terbuka.
- Saracevic, Tefco. 2001. Digital Library Evaluation Toward an Evolution of Concepts. *Library Trends*. Fall ; 49, 2 : *Proquest Profesionals Education*. Hal. 350.
- Stueart, Robert D. and Moran Barbara, B. 1993. *Library and Information Centre Management* Englewood. Colorado: Libraries Unlimited. Hlm. 11
- Suharyanto. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- Tedd, Lucy A. dan Andrew Large. 2005. *Digital Library: Principles and Practice in a Global Environment*. Munchen: K.G. Saur.
- Thomson, James. 1982. *The End of Libraries*. London : Clive Bingley.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Pascasarjana. *Multikulturalisme dalam Islam : Memahami Nilai dan Tujuan Multikulturalisme dalam Islam untuk Mencapai Kelaitas Keterpilihan* /Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta : Idea Press